BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Dana Desa (DD) merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian Dana Desa terlebih dahulu harus mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Oleh karena itu, diperlukan penatausahaan keuangan Desa. Karena pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan merupakan hal yang harus transparan dan terarah.

Akuntansi dana desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan

mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Undang-Undang yang baru saja dikeluarkan tentang Desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Dimana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan dana sebesar 10% dari APBN. Dimana dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat.

Desa memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan bagi pertanggungjawaban realisasi anggaran untuk dana yang digunakan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan IAI-KASP tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menyediakan informasi lengkap, cermat, akurat, tepat waktu sesuai dengan periode bersangkutan, akuntabel, transparan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta menyebabkan akuntansi desa cepat diterima dan diakui.

Berdasarkan Permendagri No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa

adalah sebagai berikut: 1) Membuat perencanaan berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran. 2) Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan. 3) Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi. 4) Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa. 5) Selain menghasilkan neraca untuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

Permendagri No 113 Tahun 2014 juga mengharuskan Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015), penerapan akuntansi desa diawali dari adanya APBDesa yang pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang terdiri dari pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Dalam penyusunan laporan keuangan desa berbasis pada Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran (LRA) dan Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Basis Kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima direkening kas umum desa atau oleh entitas pelaporan, serta belanja pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum desa atau entitas pelaporan. Basis Akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah desa tanpa memperhatikan saat kas atau serta kas diterima atau dibayar.

Pemerintahan Nagari VII Koto Talago tidak membuat jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Laporan keuangan yang dibuat Pemerintahan Nagari VII Koto Talago berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, setelah itu yang lainnya belum dibuat seperti Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Nagari VII Koto Talago merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Guguk dan desa yang menerima dana APBDesa setiap tahunnya. Salah satu dana APBDesa yang diterima adalah Dana Desa. Pada tahun 2017 Nagari VII Koto Talago menerima Dana Desa sebesar Rp 872.690.047. Buku-buku yang digunakan di Nagari VII Koto Talago terdiri dari (1) Buku Kas Umum Tunai, digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Buku Kas Umum Tunai dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi, (2) Buku Bank Desa, digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank, (3) Buku Kas Pembantu Pajak, digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Adapun identifikasi jenis pajak pada item kegiatan PPh pasal 21 untuk gaji, upah, honorarium, dan tunjangan, PPh pasal 22 PPN untuk belanja barang dan modal, PPh pasal 23 untuk catering (makan dan minum), PPh pasal 4 ayat 2 PPN untuk jasa konstruksi, (4) Buku Pembantu Rincian Pendapatan, digunakan untuk mencatat rincian akun tertentu yang ada di buku kas umum, (5) Buku Kas Pembantu Kegiatan, digunakan untuk membantu dalam hal keuangan desa sebagai laporan pelaksanaan kegiatan dan dapat mempengaruhi keuangan atau saldo kas di desa, Buku kas pembantu kegiatan Nagari VII Koto Talago memiliki empat bidang kegiatan yaitu: bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat, (6) Register surat Permintaan Pembayaran, digunakan untuk dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab

atas pelaksanaan kegiatan atau bendahara pengeluaran untuk mengajukan permohonan pembayaran, dan (7) Register Kwitansi Pembayaran, digunakan untuk tanda bukti bahwa telah terjadi transaksi penerimaan sejumlah uang kepada penerima uang. Yang dilengkapi dengan beberapa rincian seperti tujuan dari pembayaran atau transaksi tempat dan tanggal dimana terjadinya transaksi tersebut. Pencatatan yang dilakukan Nagari VII Koto Talago memakai dasar pencatatan *Single Entry* merupakan sistem pencatatan tunggal, yaitu setiap transaksi keuangan hanya dicatat sekali. Metode *single entry* hanya berupa daftar transaksi yang mempengaruhi akun kas artinya penerimaan kas dicatat sebagai kas masuk sedangkan pembayaran kas dicatat sebagai kas keluar.

Setelah proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Desa (LRAdes) Berdasarkan IAI-KASP (Ikatan Akuntan Indonesia)-(Kompartemen Akuntan Sektor Publik) Nagari VII Koto Talago menyajikan informasi realisasi yaitu: (1) Pendapatan Desa yang terdiri dari: pendapatan asli desa, pendapatan transfer, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa. (2) Belanja yang terdiri dari: a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa meliputi: pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, kegiatan operasional kantor nagari, kegiatan operasional BPD, kegiatan operasional Jorong, b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi: kegiatan pembangunan kantor wali nagari/jorong, kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan nagari, kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sumur resapan / embung nagari, pengembangan nagari wisata, pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum, c) Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi:

peningkatan kualitas proses perencanaan nagari, pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, fasilitasi lembaga / organisasi kemasyarakatan. (3) Pembiayaan yang terdiri dari a) penerimaan pembiayaan meliputi: sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya b) pengeluaran pembiayaan meliputi: penyertaan modal desa.

Permasalahan pertama yang terdapat pada Nagari VII Koto Talago yaitu perangkat desa di Nagari VII Koto Talago tidak membuat Laporan Kekayaan Milik Desa, harusnya dalam pernyataan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan IAI-KASP harus membuat Laporan Kekayaan Milik Desa yang fungsinya untuk mengetahui kekayaan atau posisi keuangan desa.

Masalah kedua yang terdapat pada Nagari VII Koto Talago terletak pada Daftar Aset Nagari dimana tidak disebutkan harga perolehan dari aset yang dimiliki serta tidak adanya akumulasi penyusutan tersebut. Seharusnya perangkat desa membuat daftar aset dengan harga perolehan dan nilai akumulasi penyusutan aset agar memudahkan untuk penghitungan ketika di laporan kekaayan milik desa (neraca).

Berdasarkan uraian pada permasalahan diatas maka penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih dalam lagi penerapan akuntansi keuangan desa pada Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu penulis mencoba mengungkapkan permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DESA PADA NAGARI VII KOTO TALAGO KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

“Apakah Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Telah Sesuai Dengan Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berterima Umum?”

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan akuntansi yang diterapkan di Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguk telah sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berterima Umum.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai penerapan akuntansi keuangan desa di Nagari VII Koto Talago.
- b. Manfaat penelitian bagi Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguk yaitu mengetahui manfaat dari penerapan akuntansi keuangan desa yang baik yang nantinya akan menjadikan Nagari VII Koto Talago sebagai desa yang baik dalam merencanakan keuangan desanya dan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain.
- c. Manfaat bagi mahasiswa yaitu dapat menjadi referensi dalam memperoleh materi, mengerjakan tugas dan membuat skripsi yang sejenis.

D. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi 6 bagian yang dikelompokkan ke dalam bab dan sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bagian pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Telaah pustaka, merupakan bagian yang membahas tentang teori- teori yang menjadi landasan teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini, penelitian terdahulu terkait keuangan desa, dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode penelitian, bagian ini menguraikan tentang lokasi atau objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data

BAB IV : Gambaran umum desa, bagian ini membahas sejarah singkat berdirinya Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V : Hasil penelitian dan pembahasan, bagian ini menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI : Kesimpulan dan saran, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang dilakukan, dimana bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya serta saran yang dapat diberikan dari penelitian yang ada.